

Nomor : B/843/RB.06/2022

6 Desember 2022

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kota Jambi

di

Jambi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Jambi. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi di tahun 2022 adalah **63,23** atau kategori "**B**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,64	12,93
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,19	6,48
	III. Reform	30,00	12,01	12,50
	Total Komponen Pengungkit	60,00	30,84	31,91

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,62	7,72
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,43	9,57
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,68	8,16
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,96	5,87
Total Komponen Hasil		40,00	29,69	31,32
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit * Hasil)		100,00	60,53	63,23

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada total komponen pengungkit dan total komponen hasil. Pemerintah Kota Jambi perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Terdapat sembilan hasil antara Pemerintah Kota Jambi dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	-	123,0	KASN
2.	Profesionalitas ASN	0-100	50,55	37,38	BKN
3.	Implementasi SPBE	0-5	1,69	2,79	Kementerian PANRB
4.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	59,67	63,50	LKPP
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,97	4,21	Kementerian PANRB
6.	Maturitas SPIP	0-5	Level 3	Level 3	BPKP
7.	Kapabilitas APIP	0-5	Level 3	Level 3	BPKP
8.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	89,54	89,59	Ombudsman RI
9.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	70,01	87,96	ANRI

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mayoritas kualitas hasil antara pada Pemerintah Kota Jambi di tahun 2022 mengalami peningkatan. Namun, terdapat penurunan nilai pada Indeks Profesionalitas ASN (IPASN). Selain itu, kualitas hasil antara masih perlu untuk terus ditingkatkan karena beberapa masih berada pada kategori penilaian yang belum baik. Hal tersebut yang dimaksud adalah Indeks Sistem Merit dengan kategori "Buruk", IPASN dengan kategori "Sangat Rendah", dan Indeks PBJ dengan kategori "Cukup".

3. Pemerintah Kota Jambi telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021, antara lain:

- a. Menetapkan *role model* dan agen perubahan di tingkat pemerintah pusat;
 - b. Membentuk tim evaluasi dan rewiu produk hukum daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. Melakukan penyederhanaan struktur organisasi dari pejabat administrasi (Eselon III) dan pengawas (eselon IV) ke dalam jabatan fungsional;
 - d. Melakukan rewiu proses bisnis terkait penyederhanaan birokrasi kepada 10 Perangkat Daerah (PD) dan rewiu SOP kepada 31 PD;
 - e. Melakukan evaluasi tahunan terhadap aplikasi pelayanan publik maupun internal, serta melakukan survei kepuasan layanan pada sebagian PD;
4. Selain tindak lanjut tersebut, Pemerintah Kota Jambi juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun demikian, beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di antaranya sebagai berikut:
- a. Pembangunan reformasi birokrasi di tingkat pemda dan perangkat daerah belum berorientasi pada *reform*, tetapi masih sebatas pada pelaksanaan kegiatan saja. Di samping itu, kelengkapan dokumen dan informasi yang telah disampaikan pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) belum cukup memadai untuk menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. Upaya internalisasi penerapan RB telah dilakukan, namun dinilai masih belum signifikan dalam meningkatkan pemahaman RB. Penerapan RB masih dipandang sebagai tugas tambahan dan belum menjadi bagian yang terintegrasi dengan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mewujudkan kinerja instansi;
 - c. Peran agen perubahan belum sepenuhnya dilakukan monitoring dan evaluasi secara intens, sehingga belum memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan *mind set*;
 - d. Belum memiliki peta keterkaitan dan hasil identifikasi kebijakan yang memetakan peraturan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis secara menyeluruh di semua PD;
 - e. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga belum tergambarkan tingkat kesesuaian efektivitas dan hubungan kerja antar unit organisasi dengan kinerja;
 - f. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, antara lain assessment pegawai yang belum dilakukan secara menyeluruh, ukuran kinerja individu belum sepenuhnya mengacu kepada kinerja organisasi, serta belum menerapkan kebijakan sistem merit dan manajemen talenta;
 - g. Aplikasi monitoring kinerja telah digunakan untuk kinerja harian dan kehadiran pegawai serta dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment

namun belum terdapat pedoman akuntabilitas kinerja untuk mendorong pelaksanaan manajemen kinerja yang lebih baik;

- h. Implementasi kebijakan pengawasan yang mencakup penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan, benturan kepentingan, dan Whistle-Blowing System belum dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap PD sehingga belum diketahui efektivitasnya;
- i. Memanfaatkan program pembangunan Zona Integritas terutama pada unit kerja layanan utama, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan stakeholder yang dilayani;
- j. Belum ada kebijakan sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar. Selain itu, upaya belum maksimal dalam monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.

5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kota Jambi memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen Hasil	Skala	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2.	Nilai SAKIP	0-100	67,37	Kementerian PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	95,70	Kementerian PANRB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	81,55	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	80,37	SPI Internal oleh KPK

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

6. Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di Pemerintah Kota Jambi, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

- a. Meningkatkan peran tim RB dan *asesor* dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan implementasi RB, serta menginternalisasikan RB kepada seluruh pegawai sehingga dapat berkontribusi terhadap perubahan birokrasi ke arah yang lebih efektif dan efisien di tingkat instansi;

- b. Melakukan monitoring dan evaluasi peran agen perubahan dalam mendorong perwujudan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis melalui penetapan target-target perubahan yang konkret;
- c. Melakukan identifikasi kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis secara berkala dan menyeluruh di setiap PD, menyusun peta keterkaitan, serta melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis dan SOP yang ada untuk memastikan proses kerja dapat berjalan secara optimal;
- e. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, antara lain *assessment* pegawai yang belum dilakukan secara menyeluruh, ukuran kinerja individu yang belum sepenuhnya mengacu kepada kinerja organisasi, serta belum menerapkan kebijakan sistem merit dan manajemen talenta;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja yang telah dibangun dan menyusun pedoman akuntabilitas kinerja sebagai acuan dalam mencapai kinerja yang diharapkan;
- g. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di setiap PD atas efektivitas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing System*, dan benturan kepentingan;
- h. Pembangunan Zona Integritas yang dilakukan pada beberapa perangkat daerah di tahun 2022 ini belum ada yang berhasil predikat WBK/WBBM;
- i. Mengimplementasikan sistem sanksi/*reward* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila layanan tidak sesuai standar. Selanjutnya, meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil survei pelayanan publik secara berkala;
- j. Meningkatkan mutu *self-assessment* atas aspek-aspek pada hasil antara area perubahan, serta koordinasi dengan *leading sector* yang bersangkutan agar dapat meningkatkan hasil penilaian indeks-indeks hasil antara yang masih belum maksimal.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan,**



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jambi;
4. Wali Kota Jambi.